
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (STUDI PADA DINAS SOSIAL KAB. KEDIRI)

Nurul Lailatul Sifa¹⁾, Sigit Prasetya²⁾, Prastiwi Mardijani³⁾,

Prodi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Pawayatan Daha, Indonesia

*Email : Nurullasifa38@gmail.com¹⁾, sigitprasetya1@gmail.com²⁾, prasti071052@gmail.com³⁾

Abstrak

Program Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa disingkat (BPNT) adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) berupa sembako seperti beras, telur dan sayuran. Kelompok sasaran bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang telah terdaftar di data terpadu keluarga sejahtera (DTKS). Tujuan dari program (BPNT) untuk mengurangi beban, memberikan bahan pangan yang bergizi, bantuan pangan tersebut tidak bisa dicairkan berupa uang tapi dibelanjakan di e-warung terdekat. Namun kenyataan di lapangan masih ada yang tidak tepat jumlah, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, maka dari itu penelitian ini bertujuan mengetahui telah tepat sasaran dan waktu atau belum program BPNT untuk keluarga penerima manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kediri sudah baik dan mengikuti pedoman umum BPNT yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, pihak-pihak pelaksana melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Faktor pendukung penyaluran BPNT adalah kekompakan dari beberapa pihak. Serta faktor penghambat dalam penyaluran BPNT yaitu masalah pendataan dan kurangnya sosialisasi tentang BPNT khususnya Desa Turus Kecamatan Gampengrejo.

Kata Kunci : *Pelayanan, Kualitas, Dinas Sosial, Kepuasan Masyarakat*

Abstrac

The Non-Cash Food Assistance Program or commonly abbreviated (BPNT) is a government assistance program provided by beneficiary families (KPM) in the form of basic necessities such as rice, eggs and vegetables. The target group for non-cash food assistance is families who have been registered in the integrated data of prosperous families (DTKS). The purpose of the (BPNT) program is to reduce the burden, provide nutritious food, the food assistance cannot be disbursed in the form of money but is spent at the nearest e-kiosk. However, in reality in the field there are still some that are not the right amount, not the right target, not the right time, therefore this study aims to determine whether the BPNT program has been targeted and the time or not for beneficiary families. This type of research uses a qualitative descriptive approach and uses observation, interview and documentation collection techniques. The results of this study are that the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in the Field of Handling the Poor, the Kediri Regency Social Service has been good and follows the general BPNT guidelines issued by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, the implementing parties carry out their duties and obligations. There are inhibiting factors and supporting factors in the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program carried out by the Social Service. The supporting factor for BPNT distribution is the solidarity of several parties. As well as the inhibiting factor in BPNT distribution, namely the problem of data collection and lack of socialization about BPNT, especially Turus Village, Gampengrejo District.

Keyword : Service, Quality, Social Services, Community Satisfaction

PENDAHULUAN

Bantuan sosial atau biasa disebut Bansos adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat fakir miskin, bantuan ini berupa uang atau sembako, tujuannya untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kinerja penyaluran bantuan sosial pada kenyataan sering menjadi program improvisasi yang hanya ditujukan untuk meredakan dan membantu perekonomian rakyat, hal ini berdampak pada terbatasnya waktu yang diperlukan untuk memvalidasi data rumah tangga sehingga menimbulkan masalah pendataan, kriteria penerima tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, penyaluran bantuan sosial yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat.

Tujuan program bantuan pangan non tunai BPNT dalam pedoman umum adalah mengurangi beban PKM melalui pemenuhan pangan, gizi yang cukup, meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pangan, mendorong pencapaian tujuan berkelanjutan (*sustainable development Goals / SDGs*) (Pedoman umum BPNT 2018) Masyarakat pada era keterbukaan saat ini mendapatkan pelayanan publik yang profesional dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun kadang tidak sesuai harapan yang kadang berbelit-belit, lambat hal ini sangat ironi padahal pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi. Upaya kebijakan anggaran bantuan sosial harus rasionalitas, manfaat, keadilan, kriteria yang jelas, kepatutan, akuntabilitas, transparan, penyedia anggaran harus jelas penerima serta tujuan sasaran penggunaannya. Dalam rencana UU No.20 Tahun 2019 tentang BPNT (bantuan pangan non tunai) dalam pasal ayat 1 bertujuan mengurangi beban, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan lebih pilihan proses implementasi menjadi tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah untuk KPM (keluarga penerima manfaat).

Namun kenyataan di lapangan tidak tepat jumlah, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu. Maka dari itu masih dibutuhkan keseriusan dalam mendata dan survei masyarakat kurang mampu, Implementasi program untuk menanggulangi kemiskinan harusnya berjalan secara merata, supaya masyarakat dapat terlihat dan mengetahui bahwa program untuk masyarakat miskin itu ada. Implementasi atau penerapan yang baik akan berdampak pada hasil dari program yang akan dilaksanakan. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu mengurangi kemiskinan. Jika di tahun sebelumnya, BPNT yang bersumber dari anggaran pusat atau APBN terus mengalir tanpa ada kendala, baik itu berupa sembako atau uang. Dengan proses pencairan yang berbeda jauh dari tahun 2022 kini BPNT tahun 2023 langsung di transfer ke rekening KPM selanjutnya masyarakat KPM dapat menarik saldo tersebut melalui Bank atau Kantor Pos. Setelah ada kebijakan baru mengenai penyaluran BPNT yang awalnya berupa kebutuhan pokok

seperti beras, daging, sayuransekarang BPNT langsung di tranfer ke ATM masing-masing KPM untuk membeli kebutuhan pokok sendiri. Namun ternyata kini KPM BPNT dibuat resah lantaran tidak semua cair di tahap awal. Berkaitan dengan masalah yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi program yang dijalankan oleh bidang fakir miskin, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Bidang Penanganan Fakir Miskin (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Kediri)”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang telah dijalankan oleh bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kediri? Demikian peneliti berusaha menggambarkan permasalahan yang ada melalui penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami individu dan unit sosial secara mendalam tujuannya untuk mempelajari secara intensif dari latar belakang keadaan sekarang. Peneliti mengumpulkan hasil wawancara berupa teks yang selanjutnya peneliti menganalisis berupa gambaran atau deskripsi dan peneliti uraikan dalam bentuk laporan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karna itu peneliti memfokuskan pada bagaimana proses implementasi program BPNT yang telah dijalankan oleh bidangpenanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Kediri dengan memperhatikan indikator pelaksana/alur, sasaran dan faktor pendukung atau penghambat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kediri dalam pendataan masih terbilang sangat kurang karena masih banyak keluarga miskin yang belum terdata sebagai penerima program BPNT. Berikut adalah daftar rekap dari Bank BNI dan kantor pos periode tahun 2023 untuk KPM yang mendapat BPNT :

Tabel 1. Daftar Rekap BPNT

REKAP BPNT DARI BANK BNI & POS PERIODE MARET & APRIL & MEI & JUNI					
NO	KECAMATAN	BNI MARET-APRIL	POS KEDIRI APRIL-JUNI	POS PARE APRIL-JUNI	Grand Total
1	BADAS	4.065	-	148	4.213
2	BANYAKAN	3.763	120	-	3.883
3	GAMPENGREJO	1.417	47	-	1.464
4	GROGOL	3.605	81	-	3.686
5	GURAH	4.580	117	-	4.697
6	KANDANGAN	3.191	-	256	3.447
7	KANDAT	3.958	143	-	4.101
8	KAYEN KIDUL	3.104	128	-	3.232
9	KEPUNG	5.845	-	168	6.013
10	KRAS	3.851	156	-	4.007
11	KUNJANG	3.086	65	-	3.151
12	MOJO	7.295	246	-	7.541
13	NGADILUWIH	4.634	172	-	4.806
14	NGANCAR	3.267	-	245	3.512
15	NGASEM	3.156	105	-	3.261
16	PAGU	2.409	146	-	2.555
17	PAPAR	4.363	349	-	4.712
18	PARE	4.743	-	168	4.911
19	PLEMAHAN	3.943	222	-	4.165
20	PLOSOKLATEN	4.894	83	-	4.977
21	PUNCU	4.500	-	97	4.597
22	PURWOASRI	4.923	271	-	5.194
23	RINGINREJO	3.049	78	-	3.127
24	SEMEN	5.388	274	-	5.662
25	TAROKAN	5.403	139	-	5.542
26	WATES	7.753	298	-	8.051
Grand Total		110.185	3.240	1.082	114.507

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kediri, 2023

Dalam pelaksanaannya Bantuan Pangan Non Tunai sebelumnya itu dilatar belakangi dengan sebutan bantuan beras sejahtera. Terjadinya pergantian nama ini dikarenakan faktor utamanya banyak masyarakat yang mengeluh terhadap program Rastra karena kebanyakan masyarakat hanya mendapatkan beras saja dan mereka membutuhkan juga sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergantian nama ini dilakukan pada bulan april 2018 sudah terdapat dalam peraturan menteri sosial nomor 11 tahun 2018. Dengan demikian cara untuk mengukur keberhasilan program penyaluran BPNT yang dijalankan bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial yaitu : Penyaluran/alur, Sasaran, Faktor pendukung dan penghambat.

Jurnal Ilmu Administrasi Vol.xxx No.xxx Tahun xxx

a Pelaksana/alur

Pemerintah sendiri terus melakukan penanggulangan kemiskinan hingga saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membuat program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan pemerintah telah banyak melaksanakan berbagai program. Program pemerintah tersebut diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial dapat dirasakan oleh keluarga penerima manfaat Program BPNT memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerimanya dari segi ekonomi. Seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak

berkecukupan sekarang sudah merasa semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Pemilihan sebagai salah satu pelaksanaan program BPNT tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program BPNT sudah berjalan dengan baik dari pihak Dinas Sosial, petugas TKSK dan perangkat desa.

b Sasaran

BPNT hanya diberikan kepada KPM keluarga penerima manfaat BPNT karena kurang mampu atau miskin kemudian didata dan diberi identitas Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Sasaran Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sasaran dalam penyaluran BPNT dapat disimpulkan masih belum bisa dikatakan tepat sasaran karena masih ada permasalahan di pendataan dan sekiranya hanya 80% sehingga masih harus diperbaiki.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dinas sosial khususnya bidang penanganan fakir miskin dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat tentunya tidak lepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penyaluran BPNT adalah sebagai berikut : Faktor Penghambat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya ada faktor penghambat yang dapat memengaruhi pemerintah desa dalam penyaluran BPNT bahwa dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tentunya akan ada faktor penghambat terlaksananya kegiatan tersebut termasuk dalam penyaluran BPNT pelaksanaannya yang menjadi hambatan adalah pendataan dan kurangnya sosialisasi khususnya di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo. Faktor pendukung merupakan suatu hal yang menjadi dorongan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam Implementasi Program BPNT di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, tentunya ada faktor pendukung sehingga dapat telaksana dengan maksimal. atas dapat di simpulkan bahwa dalam penyaluran BPNT yang dijalankan Dinas Sosial secara keseluruhan berjalan dengan baik dan transparansi. Transparansi merupakan salah satu

prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Terwujudnya pelaksanaan penyaluran BPNT dengan baik adalah bukti loyalitas Dinas sosial, pihak kecamatan terutama IT dan TKSK, dan seluruh jajaran lembaga desa yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penelitian temuan data, analisis dan pembahasan yang dilakukan saat penelitian dapat disimpulkan :

1. Bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kediri sudah baik dan mengikuti pedoman umum BPNT yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, pihak-pihak pelaksana melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Diliat dari fokus penelitian ketepatan sasaran, dalam implementasi program bantuan pangan Non-tunai (BPNT) belum efektif dan kurang maksimal itu dikarenakan data yang terus berubah baik karena ekonomi yang sudah membaik sampai dengan biodata yang ganda, kesalahan penulisan NIK
3. Keberhasilan dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai yang dijalankan Dinas Sosial tidak luput dari beberapa pihak mulai dari Kementerian sosial, Kecamatan, IT dan TKSK serta perangkat

Adapun saran dari penulis mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial :

1. Untuk pihak Dinas sosial melakukan sosialisasi ke desa secara langsung mengenai program BPNT
2. Lebih diperbaiki dan di maksimalkan mengenai sistem pendataan agar data atau nama KPM tidak ganda dan salah.

REFERENSI

- Agnes, dkk., (2013) Implementasi Program Sembako, jurnal governansi Vol 8 (1). Badan Ketahanan Pangan. (2019). Indeks ketahanan pangan Indonesia 2019. Jakarta: BKP Kementerian Pertanian.
- Eko Yudianto., & Yunus. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

- Hasimi, D.M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61-72.
- Ishak Fadlurrohman, dkk., (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Studi Kasus di Kota Cimahi, Vol 9 (2).
- Iwan Hermawan, dkk., (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Yogyakarta. Vol 1(2).
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.
- Meisah (2022). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Ramadhan, T., & Bahri, S. (2018). Efektivitas Program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 5(2), 1-14.
- Rohana Tiara dan Mardianto. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kota Palembang. *Jurnal Demography Journal of Sriwijaya (DeJos)*. Volume 3, Nomor 1, Januari 2019.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjilen, Alexander Phuk. (2020). *Konsep, Teori dan Teknik, analisis implementasi, kebijakan public (studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung)*. Bandung: Nusamedia.
- Yunus, Eko Yudianto. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaram Kota Probolinggo. *Jurnal Reformasi* Vol 9(2).
- Zainollah & Wahjudi, F. (2018). Analisis efektivitas kebijakan Program Rastha terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 163-175.